



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1476, 2017

KEMEN-KP. Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN
PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Satuan Pendidikan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organissasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Pemimpin adalah orang yang memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian.
3. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, dan Instruktur, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan kelautan dan perikanan.
7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Satuan Pendidikan tinggi.
8. Dewan Guru adalah kelompok fungsional guru yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan dan berfungsi sebagai pemberi

nasehat, penjaga integritas dan etika warga Satuan Pendidikan serta mengembangkan pemikiran dalam rangka mendukung peran serta Satuan Pendidikan bagi kesejahteraan masyarakat.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. pendidikan tinggi:
 1. Sekolah Tinggi Perikanan;
 2. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.
- b. pendidikan menengah yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh:
 - a. Ketua, untuk Sekolah Tinggi Perikanan;
 - b. Direktur, untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan;
 - c. Direktur, untuk Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Kepala, untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Pembantu Ketua, untuk Ketua pada Sekolah Tinggi Perikanan;
 - b. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Politeknik Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Wakil Kepala, untuk Kepala pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Pasal 4

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri dari:

- a. Dosen dan Instruktur pada Pendidikan tinggi; dan
- b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pemimpin

Pasal 5

Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.

- (2) Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Sekolah Tinggi Perikanan.

Pasal 7

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf c, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diangkat oleh Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- (2) Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah dalam mengangkat wakil kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rapat Dewan Guru.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian diangkat berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Calon PNS atau dari PNS dari jabatan lain.
- (3) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 13

- (1) Syarat umum pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai PNS;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki pengetahuan tentang kurikulum pada Satuan Pendidikan yang akan dipimpinya;
 - f. kreatif dan inovatif;
 - g. mampu menyusun program pendidikan;
 - h. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;

- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. memiliki kemampuan manajerial;
 - k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
 - l. memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - m. memiliki wawasan dan kemampuan mengembangkan unit produksi;
 - n. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
 - o. memahami teknologi informasi.
- (2) Syarat umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai PNS;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan mata kuliah/pelajaran yang akan diampu;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berbahasa Inggris aktif bagi guru dan dosen; dan
 - g. memahami teknologi informasi.

Pasal 14

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri dari:

- a. berasal dari jabatan fungsional Dosen yang telah menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, atau jabatan selain Dosen yang telah menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.

Pasal 15

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri dari:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor Kepala;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor Kepala;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri dari:

- a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri dari:

- a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dari Calon Dosen, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 untuk lulusan dari Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A;
 - c. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;
 - d. telah melaksanakan tugas utama sebagai tenaga pengajar atau calon PNS Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat; dan
 - f. memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit 55% dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - 2) paling sedikit 25% dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - 3) paling banyak 10% dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
- (2) Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) serta harus linier dengan mata kuliah dan/atau program studi yang akan diampu;
 - b. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 untuk lulusan dari Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A; dan
 - c. untuk dapat diangkat sebagai Dosen dengan jabatan:
 - 1) Asisten Ahli harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 55% dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - b) paling sedikit 25% dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
 - 2) Lektor harus memenuhi paling sedikit 50 (lima puluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
 - a) paling sedikit 45% dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;

- b) paling sedikit 30% dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
- 3) Lektor Kepala harus berkualifikasi pendidikan lulusan S3 dan paling sedikit 200 (dua ratus) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
- a) paling sedikit 40% dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - b) paling sedikit 40% dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat, untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, atau persetujuan Senat untuk jabatan Lektor Kepala.

Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat calon Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, persyaratan berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat lebih rendah dari 3,50 bagi yang memiliki bidang keahlian atau kompetensi khusus.

Pasal 22

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari Calon PNS Guru, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari Perguruan

- tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 untuk lulusan dari Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75 untuk lulusan dari Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi; dan
 - e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri dari:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari Perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 untuk lulusan dari Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75 untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;
 - e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - f. mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan paling singkat 2 (dua) tahun; dan

- g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 23

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Instruktur yang berasal dari Calon PNS Instruktur, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - c. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk instruktur yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri dari:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. memiliki pengalaman dibidang pelatihan dan pengajaran paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya; dan
 - e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Instruktur setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Masa Tugas

Pasal 24

- (1) Pemimpin Satuan Pendidikan, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (2) Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyelesaikan masa tugas selama 2 (dua) kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali sebagai Pemimpin Satuan Pendidikan apabila telah melewati tenggang waktu paling singkat 1 (satu) kali masa tugas.

BAB III

PEMINDAHAN

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan/atau kemampuan Pemimpin dan Pendidik, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan antar Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidik dapat berpindah/mengajukan pindah ke dalam jabatan lain sepanjang tidak mengganggu formasi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan Pemimpin dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemimpin

Pasal 26

- (1) Pemimpin Satuan Pendidikan berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. masa penugasan berakhir.
- (2) Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. diberhentikan sebagai PNS;
 - c. diangkat dalam jabatan struktural atau ditugaskan penuh diluar jabatan, untuk Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan, Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan anak ke-4 (empat) dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. adanya perampangan organisasi pemerintah;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus; atau
 - i. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

- (3) Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan karena tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus memperhatikan:
- a. kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas;
 - b. kemampuan yang bersangkutan dalam menggerakkan seluruh unsur sumber daya; dan/atau
 - c. kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan hubungan sosial untuk memperkokoh eksistensi unit kerja yang dipimpinnya.
- (4) Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 27

Pendidik pada Satuan Pendidikan dapat diberhentikan, dibebaskan sementara dari jabatan, dan diangkat kembali dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, Pemimpin Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan tugas:

- a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
- b. selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) masa tugas;

- c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua; dan
- d. selama 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang berwenang dapat ditugaskan ke Satuan Pendidikan lain yang setingkat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA